

KEPENTINGAN TIONGKOK TERHADAP KONFLIK KACHIN DI MYANMAR TAHUN 2011-2013

Oleh:

Muhammad Rizky Reza Lubis¹
(rizkyrezalubis@gmail.com)

Pembimbing : Yusnarida Eka Nizmi, S. IP, M. Si

Bibliografi : 13 Buku, 9 Jurnal, 48 Media Masa Elektronik dan/atau Situs Web, 1 Film;
tahun 1998-2014

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research examines the dynamics of internal conflict on Myanmar, especially in Kachin State which has affected Tiongkok Policy toward Myanmar. Since President U Thein Sein's government ascended to the power in March 2011, Myanmar's political spring is gradually moving ahead. However, admit the brighter progress, there are struggles and frustrations embedded. Armed conflict between Kachin Independent Organizations (KIO) and government's troops (Tatmadaw) is still going on. The Kachin conflict has been a policy challenge for Tiongkok. Border tranquility, the protection of Chinese investments and the prevention of expanding US influence are the top three considerations for all border regions. The Kachin conflict has disrupted Tiongkok's border security and jeopardized its economic investments in the region.

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the Tiongkok's interest on Kachin Conflict. This research applied neo-realis paradigm and intervention concept from J.G. Strake. The theories applied in this research are objectivity theory from Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi on International and World Politics – Security, Economy, Identity

This research shows that how the Kachin conflict affects these interests of Tiongkok has played a determining role in Tiongkok's policy toward the conflict. Tiongkok's most significant policy adjustment on the Kachin conflict was intervention in the negotiations. Tiongkok offered to resolve this difference by providing place for the talks. In addition, Tiongkok also explicitly guaranteed the security of all participants, sending armed police to guard the perimeter. To strengthen policy coordination and implementation, Tiongkok for the first time created a "Special Envoy on Asian affairs" to "participate in related Sino-Myanmar affairs"

Keywords: Myanmar, Tiongkok, Kachin Conflict, Intervention

1 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kajian diplomasi dan strategi yang menganalisis kepentingan Tiongkok terhadap Konflik Kachin di Myanmar pada tahun 2011-2013. Setelah Perang Dingin berakhir, kawasan Asia Tenggara bangkit dan berhasil menjadi aspek yang patut diperhitungkan dalam ekonomi, politik, serta strategi. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)² sebagai salah satu negara *super power* melihat kawasan Asia Tenggara dalam perhitungan politik luar negerinya.

Myanmar (Burma) merupakan negara yang memiliki ikatan sejarah yang cukup kuat dengan Tiongkok, baik dalam ekonomi maupun politik. Hubungan Tiongkok dan Myanmar telah terjalin cukup lama. Hubungan baik kedua negara mulai ditunjukkan dengan Myanmar mendukung kemerdekaan Tiongkok. Myanmar adalah Negara non-komunis pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Tiongkok pada 1949.³ Tiongkok dan Myanmar menjalin hubungan secara formal sejak 8 Juni 1950. Hubungan kedua negara terus berlanjut, ditandai dengan seringnya kunjungan kedua kepala negara. Hubungan kedua negara ini dikenal dengan sebutan "*Paukaw*" yang berarti saudara atau keluarga.

Hubungan kedua negara semakin erat semenjak terjadi kudeta militer yang dilakukan jendral Ne Win pada 1962. Meski banyak terjadi pelanggaran HAM di Myanmar pada masa itu, Tiongkok masih menjadi sekutu tunggal bagi Myanmar. Sejak 2011, Myanmar telah membuat perubahan yang substansial dalam demokratisasi politik. Perdamaian dengan

oposisi yang demokratis (terutama *National League for Democracy* (NLD) yang dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi) mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional. Hasilnya, negara-negara barat mencabut sanksi-sanksi ekonomi mereka terhadap Myanmar terkait dengan pelanggaran HAM. Sejalan dengan berjalannya demokratisasi, perdamaian dengan negara-negara bagian dan etnis minoritas di Myanmar telah menemukan kesepakatan damai. Dari sekian banyak kelompok etnis, hanya *Kachin Independence Army* (KIA) yang masih melakukan konflik bersenjata dengan Tatmadaw (angkatan bersenjata/militer Myanmar) dan belum mencapai kesepakatan damai. Bisa dikatakan bahwa konflik di negara bagian Kachin yang berbatasan dengan Tiongkok merupakan kunci masalah dalam proses perdamaian di Myanmar.

Semenjak terjadinya konflik di negara bagian Kachin, Hubungan antara Myanmar dan Tiongkok menjadi lebih sensitif dengan masalah perbatasan. Beberapa kali Tiongkok mengirimkan *protest note* dan mengutus diplomatnya untuk menyampaikan ketidakpuasan Tiongkok terhadap keberadaan konflik Kachin yang berbatasan langsung dengan provinsi Yunnan. Adanya peningkatan ketegangan konflik pada tahun 2011, telah merubah cara pandang pembuat kebijakan Tiongkok terhadap area perbatasan tersebut. Tiongkok mulai meningkatkan penyebaran militernya di area perbatasan, khususnya di provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan negara bagian Kachin.

Tiongkok, sebagai negara terdekat baik dari segi geografis maupun politis dengan Myanmar, merasakan dampak dari adanya konflik di negara bagian Kachin tersebut. Dampak dari adanya konflik Kachin tersebut meliputi banyak aspek, termasuk yang paling krusial terhadap Tiongkok, seperti; geografis, politis,

2 Selanjutnya agar memudahkan dalam membaca penelitian ini Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akan ditulis Tiongkok.

3 Peter Carey, 1997, *Burma: The Challenge of Change in a Divided Society* (ed), London: Macmillan Press.

ekonomis, dan keamanan. Maka dari itu, Tiongkok merasa perlu untuk melakukan kebijakan intervensi terhadap konflik tersebut. Berdasarkan isu tersebut, penulis memaparkan masalah yang cukup relevan untuk diteliti yaitu: “Mengapa Tiongkok Melakukan Intervensi terhadap Konflik Kachin Tahun 2011-2013?”

Kerangka Teori

Penulis menggunakan kerangka dasar teori yang beranjak pada perspektif Neo-realis, dimana dalam Neo-realis tidak lagi aktor yang menjadi fokus utama tetapi unit-unit yang berinteraksi didalam sistem yang menjadi fokus kajian. Neo-realis bisa dikatakan sebagai “anak” dari realis, dimana pada dasarnya keduanya memiliki beberapa konsep yang sama. Perbedaan mendasar antara realis dan neo-realis adalah pandangan tentang *power*, realis melihat *power* hanya sebatas kekuatan militer, sedangkan neo-realis melihat *power* merupakan gabungan-gabungan kekuatan yang dimiliki suatu negara dan *power* tersebut akan menentukan posisi negara di dunia.

Tujuan politik luar negeri adalah mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Kepentingan nasional dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun bisa juga terjadi atas gabungan antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya formulasi kebijakan luar

negeri dari pertimbangan ideologis dan kepentingan.⁴

Setiap negara membutuhkan campur tangan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, karena setiap negara tidak akan mampu menyediakan segala barang dan jasa tanpa adanya interaksi dengan negara lain. Tetapi tidak semua negara berkepentingan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat membantu negara lain dalam memenuhi kepentingannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar suatu negara memenuhi kehendak negara lain adalah dengan mengadakan campur tangan atau intervensi dalam urusan internal suatu negara.⁵

Menurut Dr. Ali Sastroamidjojo, Intervensi merupakan salah satu bentuk ikut serta dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional.⁶ Menurut J.G. Starke, ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi negara terhadap negara lain, yaitu:⁷

1. Intervensi Internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain.
2. Intervensi Eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah negara dalam urusan luar negeri sebuah negara dengan negara lain.
3. Intervensi *Punitive*, yaitu intervensi sebuah negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh negara tersebut.

4 Sumpena Prawira Saputra, 1985, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Remaja Karya Offset, hal. 24

5 Parry and Grant, 1986, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana Publication, Inc, Hal. 190-191 tersedia di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32565/3/Chapter%20II.pdf> diunduh pada 14 Juni 2014, Pukul 14.31 WIB.

6 Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Batara,, hal.108

7 J.G Starke, 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.136-137

Menurut J.G. Starke, intervensi tidak akan selalu menuju ke arah perdamaian atau mampu menyelesaikan masalah justru bisa sebaliknya. *Subversive intervention* merupakan intervensi yang tidak memberi jalan keluar menuju suatu perdamaian bahkan menimbulkan atau membuat suatu keadaan menjadi lebih buruk.⁸ Dalam menganalisis kepentingan Tiongkok terhadap konflik Kachin, penulis menggunakan Teori Objektivitas. Menurut Viotti dan Kauppi dalam bukunya *International Relations and World Politics – Security, Economy, Identity*, objektivitas merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui faktor-faktor pendorong. Dalam Teori Objektivitas, keputusan atau kebijakan yang dibuat tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional, tetapi didasari oleh tujuan spesifik dan objektif. Ada 4 hal yang mendorong objektivitas sebagai produk keputusan yaitu; Kepentingan (*interests*), Ancaman (*threats*), Kemampuan (*capabilities*), Peluang (*Opportunities*).⁹

Keempat faktor tersebut merupakan faktor pendorong objektivitas sebagai produk dari keputusan. Dalam menentukan objektivitas, pembuat keputusan harus mempertimbangkan keempat faktor tersebut dimana faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh dalam proses pencapaian dan keberhasilan dari objektivitas.¹⁰ Berdasarkan teori tersebut, intervensi Tiongkok terhadap konflik Kachin bertujuan untuk mencapai objektivitas yang didasari pertimbangan keempat faktor tersebut. Dalam isu tersebut, keempat faktor tersebut adalah:

1. Kepentingan (*Interest*)

Salah satu tujuan utama Tiongkok melakukan intervensi terhadap konflik

Kachin adalah untuk melindungi kepentingannya di bidang ekonomi, politik dan keamanan. Keberadaan Konflik Kachin telah mengancam stabilitas perbatasan dan mengganggu investasi Tiongkok di negara bagian Kachin, termasuk proyek-proyek terbesar Tiongkok, yaitu bendungan Myitsone, jalur pipa gas minyak Sino-Myanmar. Selain itu, masuknya ribuan pengungsi ke Tiongkok telah mengganggu aktivitas ekonomi lokal serta meningkatkan perdagangan ilegal. Hal tersebut merupakan kepentingan utama Tiongkok yang mendorong terbentuknya objektivitas.

2. Ancaman (*Threats*)

Meningkatnya ketegangan di negara bagian Kachin telah mengancam daerah perbatasan Tiongkok, khususnya provinsi Yunnan. Beberapa aliteri dari peperangan mengenai wilayah Tiongkok. Selain itu, meningkatnya gejolak pengungsi telah meningkatkan tindakan kriminalitas di perbatasan, hal ini mengharuskan Tiongkok menambah personil militer yang bertugas di perbatasan. Selain itu, adanya isu “internasionalisasi konflik” akan mengancam hegemoni Tiongkok di Myanmar. faktor ancaman ini mengharuskan Tiongkok untuk menentukan objektivitas dengan cepat.

3. Kemampuan (*Capabilities*)

Sebagai negara *super power* yang memiliki pengaruh yang kuat di Myanmar semenjak kemerdekaannya pada 1947. Tiongkok merasa mampu untuk ikut dalam penyelesaian konflik di area perbatasannya. Faktor ini lah yang mendorong Tiongkok untuk melakukan intervensi dalam mencapai objektivitasnya.

4. Peluang (*Opportunities*)

Adanya keinginan dari pemerintah Myanmar dan *Kachin Independence Organization* untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk melakukan intervensi. Tiongkok merupakan salah satu

8 *Ibid.*

9 Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, 1997, *International and World Politics – Security, Economy, Identity*. Prentice Hall. Inc. Hal. 88-90

10 *Ibid.*

pihak yang dipercaya dan memiliki kepentingan dalam penyelesaian konflik tersebut maka Tiongkok mengajukan diri sebagai pihak ketiga.

ISI

Semenjak meraih kemerdekaan 1948, Konflik etnis telah menjadi masalah terus menerus bagi Myanmar. Pemerintah pusat Myanmar tidak pernah melakukan tindakan yang dapat memanajemen konflik secara efektif,¹¹ Konflik sering terjadi pada area-area perbatasan yang banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok etnis dengan angkatan bersenjata mereka sendiri. Area yang rawan terjadi konflik adalah negara bagian Kachin dan Shan yang berbatasan langsung dengan provinsi Yunnan, Tiongkok. Negara bagian tersebut terdiri atas kelompok-kelompok etnis yang memiliki angkatan bersenjata, salah satunya adalah *Kachin Independence Organization* (KIO) dengan angkatan bersenjatanya *Kachin Independence Army* (KIA) yang merupakan, salah satu etnis dengan kekuatan terbesar di Myanmar, mereka mengklaim memiliki 10.000 pasukan.¹²

Sejarah Konflik Kachin

Ketegangan hubungan antara Kachin dan pemerintah pusat Myanmar telah terjadi cukup lama. Sejarahnya dimulai saat 1947 *Panglong Agreement* (Perjanjian Panglong) ditandatangani, tujuan dari *Panglong Agreement* adalah untuk mendirikan negara federal yang sebelumnya independen, kurang lebih seperti AS dan UE. Dalam perjanjian ini negara-negara bagian memiliki

hak “otonomi internal”.¹³ Kachin merasa bahwa mereka merupakan penolong dan pemeran penting dalam pembentukan dan kemerdekaan Myanmar pada 1948.¹⁴ Tetapi, dalam 6 dekade terakhir, Kachin merasakan ketidakpuasan terhadap masalah ketidakadilan etnis, diskriminasi, dan pengabaian yang dilakukan pemerintah terhadap etnis-etnis minoritas serta gagalnya dalam mengimplementasikan *Palong Agreement*.¹⁵ Hasilnya, KIO melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar, telah terjadi konflik bersenjata antara KIO dan pemerintah Myanmar selama 3 dekade dimulai dari tahun 1960-1990an.¹⁶

Pada tahun 1994, KIO menandatangani gencatan senjata dengan *State Law and Restoration Council* (SLORC)¹⁷, dengan syarat dijaminnya otonomi politik di negara bagian Kachin. Sejak 2009 hingga 2010, *State Peace and Development Council* (SPDC) berulang kali memerintahkan untuk merubah *Kachin Independence Army* (KIA) menjadi *Border Guard Force* (BGF) dibawah perintah Tatmadaw. Pemaksaan yang dilakukan pemerintah dan manajemen yang buruk terhadap rencana BGF justru memperparah permusushan dan ketidakpercayaan. Maka

¹³ *The Kachin Crisis, Loc. Cit.*

¹⁴ *New Chinese Foreign Investment Commitment Exceed \$8 billion*, The Myanmar Times, 20 Agustus 2010, <http://www.mmmtimes.com/2010/business/536/biz001.html>, diakses pada 12 April 2014, pukul 23.41 WIB.

¹⁵ *The Kachin Crisis, Loc. Cit.*

¹⁶ *Burma: Army committing abuses in Kachin state*, Human Rights Watch, 18 Oktober 2011, tersedia di <http://www.hrw.org/news/2011/10/18/burma-army-committing-abuses-kachin-state> diakses pada 3 Desember 2014, pukul 15.00 WIB

¹⁷ *State Law and Restoration Council* (SLORC) adalah nama resmi dari rejim militer Myanmar, rejim ini mendapatkan kekuasaan bukan dari pemilu melainkan kekerasan dan sangat banyak pelanggaran HAM yang telah dilakukan SLORC. Huang, *Loc Cit.* Hal 1.

¹¹ *The Kachin Crisis: Peace Must Prevail*, Transnational Institute, Burma Policy Briefing No.10, Maret. 2013

¹² Contohnya; pada masa pemerintahan U Nu, pemerintah pusat mendorong agar Budha menjadi *state-religion* di negara bagian.

usul atas gencatan senjata ditolak oleh mayoritas etnis Kachin. Pada September 2010, pemerintah pusat Myanmar menetapkan KIA sebagai organisasi ilegal dalam *Unlawful Association Act* di Myanmar.

17 tahun gencatan senjata berakhir ketika pemerintah pusat Myanmar melakukan serangan militer yang besar terhadap KIA pada 9 Juni 2011. Pemicu dari serangan tersebut adalah untuk mengambil alih atau mengontrol wilayah Kachin karena pada awal tahun akan dibangun proyek bendungan Tiongkok (*Chinese Dapein Dam*).¹⁸ Selain itu status KIO yang masih belum jelas dan ketidakadilan terhadap etnis Kachin menjadi faktor terjadinya pertempuran besar yang mengakibatkan digusurnya lebih dari 100.000 warga sipil dari dalam maupun luar negara bagian Kachin.¹⁹

Konflik yang terjadi baru-baru ini adalah pada akhir tahun 2012 hingga awal 2013 ketika Tatmadaw meluncurkan serangan udara dan artileri besar-besaran ke Lazia, dimana kota tersebut merupakan markas besar dari KIO.²⁰ Sulit untuk mendapatkan jumlah pasti dari korban penyerangan ini, Tatmadaw mengklaim bahwa korban dari pihak pemerintah mencapai 1000 jiwa,²¹ sedangkan KIO

sendiri mengklaim bahwa pasukan pemerintah telah membunuh, menyiksa, menjarah dan memperkosa hingga 6000 jiwa.²² Salah satu strategi militer yang dilakukan oleh Tatmadaw adalah *War Rape* atau pemerkosaan dalam perang, dimana strategi tersebut cukup ampuh untuk menghancurkan komunitas (dalam konteks ini komunitas etnis), karena dampak dari strategi *War Rape* bukan hanya fisik, melainkan mental yang bertujuan untuk mempermalukan musuh dan berdampak jangka panjang dan luas.

Pemerintah Myanmar dan Upaya Resolusi Konflik

Usaha manajemen konflik dimulai dengan adanya pembicaraan mengenai perdamaian setelah pecahnya konflik Kachin, dengan dua putaran antara KIO dengan pemerintah negara bagian Kachin, diisenggarakan pada 30 Juni dan 1 Agustus 2011. Dalam dua tahun selanjutnya telah terjadi belasan kali pembicaraan mengenai perdamaian tetapi hal itu dirusak oleh beberapa hal, yaitu:

1. Pilihan pemerintah yang buruk pada negosiator di awal. Pemerintah memilih mantan Kolonel Angkatan Darat Aung Thaung yang garis keras sebagai negosiator, Aung Thaung memiliki kepentingan bisnis yang luas dan fleksibilitas yang rendah terhadap konflik Kachin. Sehingga pembicaraan tersebut tidak menghasilkan apapun.²³
2. Adanya ketidaksepakatan pada rincian teknis pelaksanaan, khususnya pada lokasi pembicaraan.

¹⁸ Yun Sun, *China the United States and Kachin Conflict*, Issue Brief No. 2 Januari 2014. Hal 4

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zen Myat Lahpai, *Burma army strike hits Laiza, three civilians killed*, The Irrawaddy, 14 Januari 2013. Tersedia di <http://www.irrawaddy.org/burma/breaking-news/burma-army-strike-hits-laiza-three-civilians-killed.html> diakses pada 14 April 2014, pukul 22.01 WIB.

²¹ *More than 1,000 casualties in the Kachin campaign: Army report*, Shan Herald Agency for News, 28 Agustus 2013, Tersedia di http://www.english.panglong.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5564:more-than-1000-casualties-in-the-kachin-campaign-army-

[report&catid=86:war&Itemid=284](http://www.irrawaddy.org/burma/what-does-the-future-hold-for-aung-thaung-sons.html) diakses pada 14 April 2014, pukul 20.47 WIB.

²² Sun, *Loc Cit.* Hal. 4

²³ Seamus Martov, *What does the future hold for Aung Thaung & sons?* The Irrawaddy, 11 Mei 2012 tersedia di <http://www.irrawaddy.org/burma/what-does-the-future-hold-for-aung-thaung-sons.html> diakses pada 9 April 2014, Pukul 22.32 WIB.

hal ini disebabkan karena ketidakpercayaan yang berbasis sejarah. Kedua belah pihak baik pemerintah maupun KIO enggan untuk melakukan pembicaraan atau negosiasi di daerah masing-masing.²⁴ Oleh karena itu beberapa kali putaran pembicaraan dilakukan di Chiang Mai, Thailand dan Ruili di Tiongkok.

3. Tingkat partisipasi yang tidak merata. Pada pembicaraan 30 Oktober 2012, pihak pemerintah mengirimkan militer tingkat tinggi sebagai delegasi untuk membahas penarikan pasukan dan pemisahan diri Kachin. Tetapi KIA justru tidak mengutus pemimpin-pemimpin senior.²⁵ Kurang dari dua bulan setelah pertemuan di bulan Oktober tersebut, Tatmadaw meluncurkan serangan udara besar-besaran dan menembakan artileri ke wilayah KIA.
4. Keengganan kedua belah pihak untuk melakukan kompromi. Contohnya, dalam perundingan mengenai pemisahan diri, KIA merasa bahwa Tatmadaw harus menarik pasukannya dari wilayah yang ditempatinya semenjak Juni 2011, sementara itu Tatmadaw menolak meninggalkan diri dari wilayah tentaranya tersebut.²⁶

Menurut pemimpin senior KIO, penolakan gencatan senjata yang mereka lakukan, berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, tujuan akhir dari negosiasi yang dilakukan KIO adalah untuk adanya pembagian kekuatan dan keuntungan (terutama dalam industri ekstraktif), serta revisi konstitusi. KIO berpendapat bahwa usaha gencatan senjata yang dilakukan

pemerintah akan merusak upaya negosiasi mereka. Dengan logika bahwa satu-satunya tujuan pemerintah melakukan gencatan senjata adalah untuk tujuan politik domestik dan pencitraan terhadap dunia internasional; oleh karena itu, setelah tujuan tersebut tercapai pemerintah akan menghentikan negosiasi maka situasi dan isu kembali krisis dan bahkan lebih parah dari status pra-2011. KIA beragumen bahwa setiap gencatan senjata dengan tanpa solusi politik jangka panjang tidak akan berarti apa-apa dan hanya bersifat sementara, dan justru mengarah ke konflik bersenjata yang lebih besar.

Intervensi Tiongkok

Bagaimana Konflik Kachin telah memberikan dampak pada kepentingan-kepentingan Tiongkok dan mempengaruhi kebijakan Tiongkok terhadap Konflik tersebut. Kebijakan paling signifikan Tiongkok yaitu intervensi dalam proses negosiasi konflik Kachin,

Tiongkok Mengajukan Diri Menjadi Mediator, karena kurangnya kepercayaan antara KIO dan pemerintah Myanmar, maka keduanya setuju untuk menggunakan lokasi pihak ketiga. Tiongkok menawarkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam resolusi konflik ini dengan menyediakan tempat - Hotel Jingcheng di Ruili. Selain itu, Tiongkok juga secara eksplisit menjamin keamanan seluruh peserta, mengirimkan polisi bersenjata untuk menjaga berlangsungnya pembicaraan. Pada substansi pembicaraan, Tiongkok memainkan peran dalam mengkoordinasikan dan mediasi menurut pedoman Tiongkok "membujuk untuk perdamaian dan mempromosikan pembicaraan damai".²⁷

Tiongkok menjadi tuan rumah dalam beberapa putaran pembicaraan damai, dalam

²⁴ Sun, *Loc. Cit.* Hal. 5.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sun, *Loc. Cit.*,

proses pembicaraan damai Tiongkok beberapa kali menyinggung kepentingan-kepentingan Tiongkok yang mulai terganggu dengan adanya konflik tersebut. Tiongkok memainkan peran tidak hanya sebagai mediator untuk perdamaian dan stabilitas Kachin, tetapi juga sebagai negosiator atas kepentingannya. Meskipun begitu, fokus utama Tiongkok dalam waktu dekat adalah berkurangnya konflik dan adanya gencatan senjata di area Kachin.²⁸

Tiongkok Mengirim Pasukan Militer di Perbatasan, Tiongkok menambah pasukan militernya di area perbatasan negara bagian Kachin, Myanmar dengan provinsi Yunnan, Tiongkok. Banyaknya gejolak pengungsi yang mencoba memasuki provinsi Yunnan dan ledakan-ledakan artileri yang menyentuh area-area perbatasan Tiongkok telah memicu beberapa kali konflik antara militer Tiongkok dengan Tatmadaw ataupun KIA. Tiongkok mengklaim bahwa tindakan militer yang dilakukannya merupakan bentuk pertahanan diri untuk menjaga stabilitas perbatasannya.²⁹

Beberapa kali pasukan militer Tiongkok yang bertugas di area yang berdekatan dengan area konflik terlibat perselisihan baik dengan Tatmadaw maupun KIA dipicu oleh serangan artileri-artilери yang mengenai wilayah Tiongkok. Pasukan militer Tiongkok difokuskan untuk mencegah masuknya pengungsi dan perdagangan ilegal ke provinsi Yunnan. Namun meningkatnya ketegangan konflik bersenjata tersebut mengharuskan pasukan yang bertugas untuk terlibat.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *China Sends Troops to Border with Conflict-torn Myanmar*, Reuters, 11 Januari 2013, Tersedia di http://www.reuters.com/article/2013/01/11/us-china-myanmar_idUSBRE90A0FN20130111 diakses pada 24 September 2014, pukul 18.54 WIB.

³⁰ *Ibid.*

Tiongkok Mengirim Diplomat untuk Bernegosiasi, Di sisi sipil, Beijing mendesak mengirimkan seorang diplomat senior, Wakil Menteri Luar Negeri Fu Ying, sebagai utusan khusus untuk Myanmar, di mana ia bertemu dengan Presiden Thein Sein pada 19 Januari 2013 untuk menyuarakan ketidakpuasan Tiongkok.³¹ Selama kunjungannya ke Myanmar, Fu menyatakan keprihatinan Tiongkok terkait isu konflik yang baru terjadi di negara bagian Kachin.

Untuk memastikan bahwa Tatmadaw juga sepenuhnya mendapat pesan, Wakil Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Jenderal Qi Jianguo, tiba di Myanmar pada hari yang sama: bagaimana Myanmar akan "benar-benar menyelesaikan konflik Kachin melalui cara-cara damai serta menjaga kestabilan sepanjang daerah perbatasan Tiongkok- Myanmar " adalah prioritas utama dalam menjaga keamanan strategis Tiongkok-Myanmar.³² Hal ini dilakukan untuk mencegah Tatmadaw bertindak tanpa adanya komando dari pemerintah pusat, dikarenakan Tatmadaw cenderung melakukan serangan terhadap negara bagian Kachin tanpa adanya komando dari pemerintah pusat. Pada juni 2011, presiden Thein Sein telah beberapa kali memerintahkan Tatmadaw untuk berhenti melakukan penyerangan terhadap negara bagian Kachin, namun serangan Tatmadaw masih tetap berlanjut.³³

³¹ "Myanmar Vows to Maintain Peace on Chinese Border," China Daily, Jan. 21, 2013. Tersedia di <http://www.chinadaily.com.cn/world/2013-01/21/content16146033.htm> diakses pada 23 September 2014, pukul 22.51 WIB.

³² "China, Myanmar Hold Strategic Security Consultation," Global Times, 21 Januari 2013. Tersedia di <http://www.globaltimes.cn/content/757143.shtml> diakses pada 23 September 2014, pukul 23.11 WIB.

³³ *The Kachin Crisis: Peace Must Prevail*, Loc Cit. Hal. 20.

Tiongkok Menciptakan "Utusan Khusus Untuk Urusan Asia", Untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan implementasi di tingkat atas, Tiongkok untuk pertama kalinya menciptakan "Utusan Khusus untuk urusan Asia" untuk "berpartisipasi terkait dalam urusan Sino-Myanmar".³⁴ Pemerintah Tiongkok menunjuk mantan wakil menteri luar negeri, Wang Yingfan sebagai utusan khusus untuk urusan Asia, khususnya hubungan Sino-Myanmar. Wang Yingfan bertanggungjawab dalam proses negosiasi dengan pemerintah Myanmar terkait isu konflik Kachin. Sebelumnya, pada tahun 1995 Wang Yingfan pernah diangkat menjadi duta untuk PBB yang memfokuskan diri dengan hubungan Tiongkok dan Myanmar.³⁵

Tiongkok Menghadiri Pembicaraan Damai, Kasus ini unik karena, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Tiongkok memainkan peran yang terbuka di dalam konflik internal antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak lokal dari negara berdaulat lain dengan mengirim pejabat senior untuk menghadiri dan "menengahi" pembicaraan. Perwakilan pemerintah Tiongkok, Direktur Jenderal Departemen Asia dari Kementerian Luar Negeri Luo Zhaohui, menghadiri pembicaraan damai 4 Februari sebagai saksi.³⁶ Lima minggu kemudian, Utusan Khusus Wang Yingfan menjadi tuan rumah putaran dialog berikutnya pada 11 Maret.

³⁴ *China Confirms Appointment, Loc.Cit.*

³⁵ Teddy Ng dan Minnie Chan, *Beijing's first special envoy for Asia to focus on Myanmar*, Beijing South China Morning Post, 12 Maret 2013, tersedia di <http://www.scmp.com/news/china/article/1188814/beijings-first-special-envoy-asia-focus-myanmar> diakses pada 12 November 2014, pukul 19.41 WIB.

³⁶ *Kachin, Myanmar Negotiators Set for Talks to Curb Fighting*, Radio Free Asia, 5 Maret 2014, tersedia di <http://www.rfa.org/english/news/myanmar/kachin-talks-05122014184124.html> diakses pada 18 September 2014, pukul 21.29 WIB.

Selanjutnya, perwakilan kedutaan besar Tiongkok dan Wang Yingfan menghadiri pembicaraan damai yang diselenggarakan di negara bagian Kachin pada bulan Mei, Oktober dan November 2013.³⁷ Pada 2013, kekhawatiran paling serius Tiongkok mengenai konflik Kachin adalah potensi terjadinya "internasionalisasi." Ini juga mungkin telah menjadi faktor yang paling penting dalam keputusan Tiongkok untuk campur tangan dalam pembicaraan damai Kachin.

Kepentingan Tiongkok terhadap Konflik Kachin

Penelitian ini membuktikan bahwa tindakan suatu negara melakukan tindakan mencampuri urusan internal negara lain didasari atas adanya kepentingan yang ingin dicapai. Intervensi yang dilakukan Tiongkok merupakan upaya dari Tiongkok untuk melindungi kepentingannya di bidang ekonomi, politik dan keamanan.

A. Kepentingan Tiongkok dalam Bidang Ekonomi

Investasi Tiongkok di Myanmar telah jatuh secara drastis semenjak pemerintah reformis mulai menjabat menggantikan pemerintah junta militer semenjak maret 2011. Padahal, dari 2008 hingga 2011, total kumulatif investasi yang dilakukan Tiongkok di Myanmar dari \$1 milyar ke \$13 milyar.³⁸ Kebanyakan dari investasi ini (sekitar \$7,5 milyar menurut

³⁷ "China Willing to Play Constructive Role in Myanmar Peace Talks", 5 Desember 2013, The China Times <http://www.thechinatimes.com/online/2013/02/6579.html> diakses pada 18 September 2014, pukul 22.29 WIB.

³⁸ *China Now No.1 Investor in Burma*, Mizzima News, 18 Januari 2012, Tersedia di <http://www.mizzima.com/business/6436-china-now-no-1-investor-in-burma.html> diakses pada 19 April 2014, 21.13 WIB.

data resmi Tiongkok, Xinhua News³⁹⁾ disalurkan pada tahun 2011.⁴⁰⁾ Bagaimanapun, reformasi politik sejak 2011 telah berdampak substansial terhadap proyek-proyek Tiongkok, mengakibatkan penurunan secara cepat dalam investasi Tiongkok. Menurut laporan Myanmar, perusahaan-perusahaan Tiongkok hanya menginvestasi \$407 juta pada tahun fiskal 2012/2013, merupakan penurunan yang besar dari 2 tahun sebelumnya.

Sampai dengan tiga tahun lalu, Tiongkok tidak lagi menjadi investor terbesar bagi Myanmar. Puncak awalnya pada tahun 2010, dengan proyek-proyek utama; bendungan Myitsone, pipa minyak dan gas Sino-Myanmar, dan tambang baja Letpadaung, dimana investasi keseluruhannya telah menyumbang lebih dari \$8 milyar. Penurunan tajam dalam investasi Tiongkok pada 2012 adalah akibat dari gerakan “*Tiongkok-Unfriendly*” oleh Myanmar, Tiongkok telah memperingatkan perusahaan-perusahaannya bahwa “meningkatnya resiko politik terhadap investasi Tiongkok” di negara tersebut.⁴¹⁾ Dari sudut pandang Beijing, penduduk lokal berbalik menentang proyek-proyek Tiongkok dan pemerintah Myanmar telah enggan mendukung dan melindungi kepentingan Tiongkok.

Meskipun pada harapannya investasi Barat akan memenuhi Myanmar setelah sanksi keuangan dicabut, tetapi investasi-investasi non-Tiongkok tersebut belum bisa memenuhi atau menggantikan penurunan tajam pada investasi Tiongkok di tahun fiskal 2012/2013. Turunnya investasi Tiongkok di Myanmar telah menyebabkan

turunnya investasi asing hingga \$1.42 milyar pada tahun fiskal sebelumnya. (turun dari \$4.6 milyar dan \$ 20 milyar dalam dua tahun sebelumnya, berdasarkan data dari pemerintah Myanmar).

Politik domestik dan sentimen publik di Myanmar telah menimbulkan masalah yang tidak terduga bagi investor-investor Tiongkok. Semenjak presiden Thein Sein menjalankan pemerintahan sejak 2011, ketiga investasi terbesar dan terpenting Tiongkok di Myanmar – Bendungan Myitsone, tambang tembaga Letpadaung, serta pipa minyak dan gas Sino-Myanmar – telah menemukan kesulitan-kesulitan yang serius.⁴²⁾ Pembangunan bendungan Myistone telah diberhentikan semenjak September 2011 dan akan terus berhenti hingga akhir masa jabatan presiden Thein Sein pada 2015. Selain itu operasi tambang baja telah diberhentikan semenjak November 2012, diikuti dengan protes dari penduduk lokal dan demonstrasi yang takut apabila proyek-proyek tersebut dilanjutkan. Sementara itu proyek jalur pipa gas dan minyak Sino-Myanmar telah berjalan meskipun perlahan. Proyek dari pipa tersebut telah berjalan semenjak Juli yang diikuti dengan penolakan dan kritik dari masyarakat lokal dan oposisi.

Ketiga proyek tersebut merupakan simbol dari kepentingan utama Tiongkok terhadap transformasi Myanmar baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan proyek-proyek tersebut akan berdampak besar terhadap hubungan Tiongkok dan Myanmar di bidang ekonomi dan politik, bahkan dalam politik regional. Tiongkok pun telah mulai beradaptasi terhadap perubahan Myanmar yang baru dimana investasi-investasi yang dilakukan oleh Tiongkok dinilai “merusak” lingkungan.

Selain mengancam investasi-investasi Tiongkok, Konflik Kachin juga telah membuka peluang bagi perdagangan

³⁹⁾ Myanmar Attracts More than 8bl USD Foreign Investment in 2011, Xinhua News Agency, 13 Maret 2012.

http://news.xinhuanet.com/english/business/2012-03/16/c_131472176.htm diakses pada 19 April 2014, 21.29 WIB.

⁴⁰⁾ Ibid.

⁴¹⁾ New Chinese Foreign Investment, Loc., Cit.

⁴²⁾ Loc. Cit., Yun Sun, Hal. 4.

ilegal. KIA merupakan salah satu pasukan pemberontak yang memiliki persenjataan yang cukup kuat, sebagian besar sumber dana KIA berasal dari perdagangan ilegal kayu dan barang-barang lainnya dari negara bagian Kachin yang diselundupkan melalui perbatasan Tiongkok. Meskipun perdagangan ilegal ini ditentang oleh pemerintah Tiongkok, namun banyak pengusaha dan pedagang *black market* dari Tiongkok yang diuntungkan dari adanya kerjasama perdagangan ilegal dengan KIA. Negara bagian Kachin memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak, termasuk bermacam-macam berlian mewah dan kayu jati. Selain itu, juga terdapat perdagangan manusia dan narkoba melalui negara bagian Kachin. Perdagangan tersebut semakin marak seiring dengan meningkatnya ketegangan konflik. Perdagangan ilegal dapat menguntungkan dari sisi ekonomi lokal, tetapi secara keseluruhan hal itu merugikan negara.

B. Kepentingan Tiongkok dalam Bidang Politik

Selain dalam bidang ekonomi, Tiongkok juga mempunyai kepentingan signifikan dalam bidang politik terkait konflik Kachin. Adapun kepentingan-kepentingan utama Tiongkok dalam bidang politik adalah mencegah pengaruh barat khususnya AS yang menginginkan adanya internasionalisasi konflik. Selain itu Tiongkok juga melihat adanya potensi dari keberadaan KIO yang dapat mempengaruhi kebijakan Myanmar terhadap Tiongkok. Semenjak Agustus 2011, banyak hal yang telah membuat Tiongkok mengantisipasi Myanmar, dimulai dari adanya pembatalan secara sepihak proyek bendungan Myitsone dan semakin meningkatnya kedekatan hubungan Myanmar dengan Barat, khususnya AS. Tiongkok tidak lagi menjadi sekutu tunggal bagi Myanmar. Demokratisasi Myanmar telah membuat

Tiongkok meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan komitmennya terhadap Myanmar.

Konflik Kachin merupakan tolak ukur dari keberhasilan pemerintah reformis dalam transisi menuju demokrasi di Myanmar. Maka dari itu, Tiongkok yang berbatasan langsung dengan negara bagian Kachin memanfaatkan konflik tersebut sebagai upaya untuk menekan Myanmar dan kembali menghormati investasi Tiongkok.⁴³ Tiongkok menekankan bahwa isu konflik Kachin menjadi isu yang mengancam stabilitas perbatasan Tiongkok, sehingga mengakibatkan masalah konflik tersebut juga merupakan tanggung jawab Tiongkok. Tiongkok menciptakan skenario bahwa Tiongkok harus berpartisipasi dalam proses perdamaian konflik tersebut, tetapi di satu sisi Tiongkok menghindari adanya keterlibatan pihak ketiga lainnya ataupun adanya internasionalisasi konflik tersebut. Pada dasarnya konflik lokal bersenjata merupakan hanya isu internal bagi Myanmar. ketika konflik tersebut mempengaruhi Tiongkok, maka itu akan menjadi isu bilateral antara Tiongkok dan Myanmar. Tiongkok telah membuat usaha yang baik dalam mencegah intervensi dari pihak ketiga internasional. Pada pembicaraan damai 11 Maret di Rull, utusan khusus Tiongkok Wang Yingfan secara langsung menentang pasal yang berisikan untuk mengundang pihak ketiga dalam pembicaraan damai.⁴⁴

⁴³ Rodion Ebbighausen dan Christoph Ricking, *Tiongkok-Myanmar, Berpaling dari Sekutu Lama?*, Deutsche Welle, 15 Mei 2012, tersedia di <http://www.dw.de/Tiongkok-myanmar-berpaling-dari-sekutu-lama/a-15952043> diakses pada 11 Februari 2014, Pukul 21.20 WIB.

⁴⁴ *Op. Cit.*, Sun.

C. Kepentingan Tiongkok dalam Bidang Keamanan

Kepentingan fundamental Beijing di Myanmar terdapat dalam tiga faktor dasar: Stabilitas perbatasan, Kerjasama ekonomi, dan rute transportasi energi.

Stabilitas Perbatasan, di antara itu semua, stabilitas perbatasan menjadi prioritas utama. Konflik tersebut telah mengirim lebih dari 37.000 pengungsi ke Barat Daya Tiongkok, provinsi Yunnan dan mengakibatkan tekanan terhadap otoritas Tiongkok dalam mengontrol stabilitas perbatasan.⁴⁵

Pada 2013, Tiongkok memperkuat keamanan dan patroli diperbatasannya seiring dengan meningkatnya ketegangan konflik di negara bagian Kachin. Berdasarkan klarifikasi pemerintah Myanmar, dalam melakukan penyerangan terhadap KIA, Myanmar tidak melakukan serangan udara, namun terdapat Jet K-8 yang siaga untuk melindungi Tatmadaw dari pasukan KIA. Selain serangan artileri yang mengenai wilayah Tiongkok, banyaknya pengungsi yang bermukim di perbatasan Tiongkok telah mengancam ketertiban sosial dan ekonomi lokal.⁴⁶

Perdagangan Manusia, Berdasarkan data dari *Kachin Women Association Thailand* (KWAT), lebih dari 100.000 jiwa yang diungsikan dari negara bagian Kachin rentan akan perlindungan hukum dan kemanusiaan. Karena peraturan ketat dari pihak pemerintah Myanmar, organisasi kemanusiaan internasional sulit memberikan bantuan akibatnya hanya menyentuh 50.000 jiwa.⁴⁷ Selain kekerasan

yang dilakukan militer, ketiadaan kartu identitas membuat mereka sebagai pengungsi menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia. Perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang terancam dengan isu perdagangan manusia ini.⁴⁸

Berdasarkan laporan KWAT terdapat 24 kasus perdagangan manusia dari wilayah Kachin. 13 dari kasus tersebut, korban merupakan perempuan muda yang berusia 18 tahun dan bahkan lebih muda lagi. Kurangnya pendidikan dan kondisi keamanan yang rentan membuat perempuan-perempuan muda ini ditipu, dibius dan bahkan diperkosa dan dijual untuk pria atau keluarga-keluarga di Tiongkok. Awalnya perempuan-perempuan tersebut

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di negara bagian Kachin merupakan kunci dari keberhasilan demokratisasi Myanmar. Konflik Kachin tidak hanya berdampak pada negara bagian Kachin, melainkan juga berdampak terhadap Tiongkok yang berbatasan dengan Myanmar. Konflik Kachin merupakan konflik yang terjadi di negara bagian Kachin antara pemerintah pusat Myanmar dan kelompok kepentingan *Kachin Independence Organization* (KIO).

Tiongkok merasa perlu untuk melakukan tindakan yang dapat manajemen konflik tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Tiongkok dalam manajemen konflik tersebut adalah

⁴⁵ *China's Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics*, International Crisis Group Asia Briefing N 112, 21 September 2010. Hal. 4.

⁴⁶ China Sends Troops to Border with Conflict-torn Myanmar, *Loc.*, *Cit.*

⁴⁷ Lusha Chen, *Burma's Kachin Face Human Trafficking Threat Along Chinese Border* (Video), Huffington Post 28 Januari 2014, Tersedia di

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/27/burma-kachin-human-trafficking_n_4676106.html diakses pada 5 Desember 2014, Pukul 14.53 WIB

⁴⁸ [Myanmar] *Kachin State Conflict Increases Human Trafficking To China: Report*, Thai Visa News, 6 Juni 2013, Tersedia di www.thaivisa.com/forum/topic/644696-myanmar-kachin-state-conflict-increases-human-trafficking-to-china-report/ diakses pada 12 Mei 2014, Pukul 14.56 WIB

dengan melakukan intervensi dalam proses negosiasi perdamaian antara pemerintah pusat Myanmar dengan pasukan pemberontak *Kachin Independence Army* (KIO). Tujuan Tiongkok melakukan intervensi adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingannya yang rusak akibat adanya konflik di negara bagian Kachin. Adapun kepentingan-kepentingan utama Tiongkok terdapat dalam tiga bidang, yaitu: ekonomi, politik dan keamanan.

Refrensi

Jurnal:

- Keenan, Paul, *The Konflikt in Kachin State – Time to Revise The Cost of War* (Ed: Lian H. Sakhong) , Burma Center for Ethnic Studies Peace And Reconciliation, Vol. 1, Februari 2012.
- Sakhong, Lian H., *The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma*, Burma Centre for Ethnic Studies: Peace and Reconciliation Analysis Paper, No. 1, Januari 2012.
- Smith, Martin., *Ethnic Groups in Burma: Development, Democracy, and Human Rights*, Anti-Slavery International's Series No. 8, 1994.
- Sun, Yun, 2012, *China's Strategic Misjudgement on Myanmar*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 31. No. 1
- Sun, Yun, *China the United States and Kachin Conflict*, Stimson Center, Issue Brief, Vol. 2 Januari 2014.
- Sun, Yun, *China's Intervention in the Myanmar-Kachin Peace Talks*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol. 28. No. 2, ISSN: 1868-4882.
- Sun, Yun, *Chinese Investment in Myanmar: What Lies Ahead?*, Stimson Center, Issue Brief Vol. 1, September 2013.
- Sun, Yun, *Has China lost Myanmar?*, Foreign Policy, Jan. 15, 2013. Tersedia di

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/01/15/has_china_lost_myanmar diakses pada 22 Agustus 2014, Pukul 17.50 WIB.

The Kachin Crisis: Peace Must Prevail, Transnational Institute, Burma Policy Briefing No.10, Maret 2013.

Buku:

- Bandoro, Bantoro, 1992, *Masalah keamanan internasional*, Model center periphery. CSIS.
- Brown, Michael E., 1997, *Causes and Implications of Ethnic Conflict*, dalam *The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (eds), Great Britain: Polity Press.
- Carey, Peter, 1997, *Burma: The Challenge of Change in a Divided Society* (ed), London: Macmillan Press.
- Cresswell, John W., 1994, *Research Design*, USA: Sage Publications.
- Desmond Ball, “*Burma's Military Secrets: Signals Intelligence (SIGINT) from 1941 to Cyber Warfare*”, Bangkok: White Lotus, 1998.
- Hara, Abubakar E., 2011, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri; dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa.
- Mas'ood, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, Hal. 217.
- Papp, Daniel S., 1988 “*Contemporary International Relation*”: A Framework for Understanding, Second Editions, New York: MacMillan Publishing Company.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton, 1999, *Kamus Hubungan Internasional*. Alih Bahasa oleh Drs. Wawan Juanda. Bandung.
- Saputra, Sumpena P., 1985, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Remaja Karya Offset.

Sastroamidjojo, Ali, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Batara.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, 1997, *International and World Politics – Security, Economy, Identity*. Prentice Hall. Inc.

Waltz, Kenneth N., 1979, *Theory of International Politics*, New York: Random House.

Artikel dan Berita (Internet):

Aktivist: Myanmar Masih Gunakan Pemerkosaan Sebagai Senjata, VOA Indonesia, 15 Januari 2014, tersedia di <http://m.voaindonesia.com/a/myanmar-masih-gunakan-pemerkosaan-sebagai-senjata-perang/1830356.html> diakses pada 12 Februari 2014, pukul 15.16 WIB.

Burma Army in Tense Stand-off with Kachin Militia, BBC, 19 October 2010, tersedia di <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11571435> diakses pada 3 Desember 2014, pukul 14.21 WIB

Burma Citizen Law, 1862, diunduh dari <http://www.baliprocess.net/files/Myanmar/Myanmar%20citizenship%20law%201982-eng.pdf>, diakses pada 6 maret 2014, Pukul 22.44 WIB

Burma: Army committing abuses in Kachin state, Human Rights Watch, 18 Oktober 2011. Tersedia di <http://www.hrw.org/news/2011/10/18/burma-army-committing-abuses-kachin-state> diakses pada 12 April 2014, pukul 23.55 WIB.

Burma's New Capital Stages Parade, BBC News, 27 Maret 2006, Tersedia di <http://www.bbc.com/news/myanmar>, diakses pada 2 Februari 2014, pukul 14.13 WIB

Chen, Lusha, *Burma's Kachin Face Human Trafficking Threat Along Chinese Border* (Video), Huffington Post 28 Januari 2014, Tersedia di

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/27/burma-kachin-human-trafficking_n_4676106.html diakses pada 5 Desember 2014, Pukul 14.53 WIB

China Confirms Appointment of First Special Envoy on Asian Affairs, Xinhua news, Mar. 11, 2013. Tersedia di http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-03/11/c_132225621.htm diakses pada 23 September 2014, pukul 22.59 WIB.

China Myanmar Starts Delivering Gas, China News Agency, 29 Juli 2013, tersedia di http://www.china.org.cn/world/2013-07/29/content_29555333.htm diakses pada 11 Desember 2014, Pukul 11.54 WIB.

China Now No.1 Investor in Burma, Mizzima News, 18 Januari 2012, Tersedia di <http://www.mizzima.com/business/6436-china-now-no-1-investor-in-burma.html> diakses pada 19 April 2014, 21.13 WIB.

China Sends Troops to Border with Conflict-torn Myanmar, Reuters, 11 Januari 2013, Tersedia di <http://www.reuters.com/article/2013/01/11/us-china-myanmar-idUSBRE90A0FN20130111> diakses pada 24 September 2014, pukul 18.54 WIB.

China Willing to Play Constructive Role in Myanmar Peace Talks, 5 Desember 2013, The China Times <http://www.thechinatimes.com/online/2013/02/6579.html> diakses pada 18 September 2014, pukul 22.29 WIB.

China, Myanmar Hold Strategic Security Consultation, Global Times, Jan. 21, 2013. Tersedia di <http://www.globaltimes.cn/content/75>

- [7143.shtml](#) diakses pada 23 September 2014, pukul 23.11 WIB.
- China's Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics*, International Crisis Group Asia Briefing N 112, 21 September 2010.
- Chronology of Somalia's collapse, Conflict*, tersedia di <http://www.reuters.com/article/2007/01/01/us-somalia-idUSL0188726320070101> diakses pada 10 Juni 2014, pukul 22.16 WIB.
- Future for Myitsone dam resumption remains unclear, Chinese companies are treated unfairly in Myanmar*, [中緬密松电站重启前景不明 中企在緬甸遭遇不公] ISSU, Myanmar Weekly News, Vol.1 No. 8, July 23, 2013, Tersedia di http://issuu.com/myanmar.com/docs/myanmar_weekly_news_vol01_no.08, diakses pada 27 November 2014, pukul 15.45 WIB.
- Hattaway, Paul, *Jing-Pho, in Myanmar (Burma)*, Tersedia di http://joshuaproject.net/people_groups/12401/BM diakses pada 22 Oktober 2014, pukul 11.59 WIB.
- Jackson, Joe, *On the Front Lines with the Kachin Independence Army*, 19 April 2012, tersedia di <http://lightbox.time.com/2012/04/19/ki-a/#1>, diakses pada 3 Desember 2014, pukul 14.45 WIB
- Kachin State Conflict Increases Human Trafficking To China: Report*, Thai Visa News, 6 Juni 2013, Tersedia di www.thaivisa.com/forum/topic/64469-6-myanmar-kachin-state-conflict-increases-human-trafficking-to-china-report/ diakses pada 12 Mei 2014, Pukul 14.56 WIB
- Kachin, Myanmar Negotiators Set for Talks to Curb Fighting*, Radio Free Asia, 5 Maret 2014, tersedia di <http://www.rfa.org/english/news/myanmar/kachin-talks-05122014184124.html> diakses pada 18 September 2014, pukul 21.29 WIB.
- Kachins Want Panglong Agreement Brought Into Talks*, Mizzima News, 27 Mei 2013, tersedia di <http://www.mizzima.com/mizzima-news/ethnic-issues/item/9367-kachins-want-panglong-agreement-brought-into-talks/9367-kachins-want-panglong-agreement-brought-into-talks> diakses pada 2 Februari 2014, pukul 15.30 WIB.
- Lahpai, Zen Myat, *Burma army strike hits Laiza, three civilians killed*, The Irrawaddy, 14 Januari 2013. Tersedia di <http://www.irrawaddy.org/burma/breaking-news/burma-army-strike-hits-laiza-three-civilians-killed.html> diakses pada 14 April 2014, pukul 22.01 WIB.
- Larson, Christina, *Myanmar's Growing—and Dangerous—Jade Trade*, Global Economics, 25 Maret 2014, Tersedia di www.businessweek.com/articles/2014-03-25/myanmars-growing-and-dangerous-jade-trade diakses pada 3 Desember 2014, pukul 14.20 WIB.
- Lavevre, Amy Sawitta, *Thai Junta's Pledge to Send Back Myanmar Refugees Sparks Concern*, Reuters, 14 Juni 2014, tersedia di <http://www.reuters.com/article/2014/07/14/us-thailand-politics-myanmar-idUSKBN0FJ0I320140714> diakses pada 24 September 2014. Pukul 17.33 WIB.
- Marshall, Andrew dan Min Zayar, *Myanmar's old guard clings to \$8 billion jade empire*, The Globe and Mail, 4 Oktober 2013, Tersedia di <http://www.reuters.com/article/2013/09/29/us-myanmar-jade-specialreport->

- idUSBRE98S00H20130929 diakses pada 16 April 2014. Pukul 22.40 WIB
- Martov, Seamus, *What does the future hold for Aung Thaung & sons?* The Irrawaddy, 11 Mei 2012 tersedia di <http://www.irrawaddy.org/burma/what-does-the-future-hold-for-aung-thaung-sons.html> diakses pada 9 April 2014, Pukul 22.32 WIB.
- More than 1,000 casualties in the Kachin campaign: Army report*, Shan Herald Agency for News, 28 Agustus 2013, Tersedia di http://www.english.panglong.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5564:more-than-1000-casualties-in-the-kachin-campaign-army-report&catid=86:war&Itemid=284 diakses pada 14 April 2014, pukul 20.47 WIB.
- Myanmar Attracts More than 8bl USD Foreign Investment in 2011*, Xinhua News Agency, 13 Maret 2012. http://news.xinhuanet.com/english/business/2012-03/16/c_131472176.htm diakses pada 19 April 2014, 21.29 WIB.
- Myanmar dan Amerika Serikat Sepakat Menggalang Hubungan Diplomatik Kembali*, VoV, 2012, <http://vovworld.vn/id-id/Berita/Myanmar-dan-Amerika-Serikat-sepakat-menggalang-kembali-hubungan-diplomatik/94142.vov> diakses pada 3 Maret 2014, pukul 22.54 WIB
- Myanmar Fast Fact*, CNN Library 2013, <http://edition.cnn.com/2013/07/30/world/asia/myanmar-fast-facts/> diakses pada 3 Februari 2014, pukul 12.50 WIB
- Myanmar Government Eyes Political Talks with Rebel Groups in April*, Radio Free Asia, 25 November 2013. Tersedia di <http://www.refworld.org/docid/52e0d5eb11.html> diakses pada 15 April 2014, Pukul 21.19 WIB.
- Myanmar Vows to Maintain Peace on Chinese Border*, China Daily, 21 Januari 2013. Tersedia di http://www.chinadaily.com.cn/world/2013-01/21/content_16146033.htm diakses pada 23 September 2014, pukul 22.51 WIB.
- MYANMAR: UN convoy reaches Kachin displaced*, IRIN News, 25 Maret 2012, Tersedia di <http://www.irinnews.org/report/95150/myanmar-un-convoy-reaches-kachin-displaced> diakses pada 12 Februari 2014, pukul 15.42 WIB.
- Naing, Saw Yan, *Irrawaddy Dam Construction Begins, Human Rights Abuses Begin*, The Irrawaddy News, 15 Februari 2010, Irrawaddy Publishing Group, Tersedia di http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=10064 diakses pada 11 Desember 2011, Pukul 13.21 WIB.
- New Chinese Foreign Investment Commitment Exceed \$8 billion*, The Myanmar Times, August 20 Agustus 2010, <http://www.mmtimes.com/2010/business/536/biz001.html> diakses pada 12 April 2014, Pukul 23.41 WIB.
- Ng, Teddy dan Minnie Chan, *Beijing's first special envoy for Asia to focus on Myanmar*, Beijing South China Morning Post, 12 Maret 2013, tersedia di <http://www.scmp.com/news/china/article/1188814/beijings-first-special-envoy-asia-focus-myanmar> diakses pada 12 November 2014, pukul 19.41 WIB.
- Nye, Joseph S., *Redefining National Interest*, tersedia di <http://www.foreignaffairs.com/articles/55209/joseph-s-nye-jr/redefining-the->

- national-interest, di akses pada 7 Agustus 2014, pukul 15.30 WIB.
- Parry and Grant, 1986, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana Publication, Inc, Hal. 190-191 tersedia di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32565/3/Chapter%20II.pdf> diunduh pada 14 Juni 2014, Pukul 14.31 WIB.
- Pengungsi Kachin terpaksa kembali ke zona berbahaya, UCAN Indonesia, 14 September 2012, <http://indonesia.ucanews.com/2012/09/14/pengungsi-kachin-terpaksa-kembali-ke-zona-berbahaya/> diakses pada 12 Februari 2014, pukul 16.05 WIB.
- Reza A.A Wattimena, *Memahami Seluk Beluk Konflik antar Etnis*, tersedia di <http://rumahfilsafat.com/memahami-seluk-beluk-konflik-antar-etnis-bersama-michael-e-brown/> diakses pada tanggal 10 Juni 2014, pukul 22.35 WIB.
- Robinson, Gwen, *Kachin Conflict Puts Myanmar Reform to Test*, Financial Times, 13 Mei 2013, Tersedia di <http://www.tni.org/inthemedia/kachin-conflict-puts-myanmar-reforms-test> diakses pada 14 April 2014, pukul 22.02 WIB.
- Schearf, David, *Despite ceasefire, fighting continues in Burma's Kachin state*, Voice of America, 21 Januari 2013, Tersedia di <http://www.voanews.com/content/fighting-continues-in-burmas-kachin-state-despite-cease-fire/1587760.html> diakses pada 14 April 2014, pukul 22.20 WIB
- Shin, Aung, *Contested Sino-Myanmar Oil Pipeline Nears Completion*, The Myanmar Times, 4 Mei 2014, <http://www.mmtimes.com/index.php/business/8784-contested-sino-myanmar-oil-pipeline-nearscompletion.html> diakses pada 11 Desember 2014, pukul 12.10 WIB
- Starke, J.G., 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Untold Miseries: Wartime Abuses and Forced Displacement in Myanmar's Kachin State*. HUMAN RIGHTS WATCH, 2012, Tersedia di: <http://www.hrw.org/features/Myanmar-untold-miseries> diakses pada 24 September 2014, pukul 18.02 WIB.
- Vandenbrink, Rachel, *Kachin-Yunnan Timber Trade Hampering Peace Process in Myanmar*, Radio Free Asia, 17 Januari 2014. <http://www.rfa.org/english/news/myanmar/kachin-01172014180515.html> diakses pada 3 Desember 2014, Pukul 15.00 WIB.
- What Is Bilateral Relations?*, Wisegeek, tersedia di <http://www.wisegeek.com/what-are-bilateral-relations.htm> diakses pada 29 September 2014, Pukul 21.17 WIB.
- What Is Energy Resources?*, Bussiness Dictionary, Tersedia di <http://www.businessdictionary.com/definition/energy-resource.html> diakses pada 29 September 2014, Pukul 21.32 WIB.
- Win, She, *The Jade War*. Latitude The Jade War Comments. 17 Oktober 2012. Tersedia di <http://latitude.blogs.nytimes.com/2012/10/17/clashing-over-jade-ethnic-kachin-continue-to-oppose-the-myanmargovernment.html> diakses pada 11 Desember 2014, pukul 13.00 WIB.
- Film**
- Besson, Luc dan Rebecca Freyn, 2011, *The Lady* (Left Bank Pictures dan France 2 Cinema)

